

# **PEMARTABATAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK**

**Drs. Muh. Abdul Khak, M. Hum.**

**(Indonesia)**

## **Abstrak**

Kota metropolitan, seperti Jakarta dan Bandung, dihuni banyak etnis dengan berbagai bahasa etnisnya. Ada tiga bahasa yang secara bersamaan hidup di dalam masyarakat metropolitan itu: bahasa daerah (bahasa etnis), bahasa Indonesia (bahasa negara), dan bahasa asing. Yang menjadi pangkal persoalan adalah karena ketiga bahasa itu tidak dapat hidup berdampingan secara damai. Tanpa disadari bahasa Indonesia telah menggeser peran bahasa daerah, utamanya di dalam ranah rumah tangga. Pada saat yang bersamaan bahasa asing telah mengambil tempat utama bahasa Indonesia, yaitu di ruang-ruang publik di kota-kota besar. Persoalan ini tentu berhubungan dengan sikap dan mental bangsa Indonesia sendiri karena mereka lebih bangga dengan bahasa asing. Untuk itu, harus ada upaya untuk kembali memartabatkan bahasa negara di ruang publik sehingga muruah bahasa negara kembali terangkat. Tiga hal yang harus dilakukan berkaitan dengan usaha itu. Pertama, istilah/kosakata asing yang kita temukan dalam berbagai ranah ruang publik harus dibuatkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kedua, mengajak pemangku kepentingan, yakni para pengusaha dan pemerintah daerah untuk kembali mengutamakan bahasa negara. Ketiga, dengan kekuasaannya, pemerintah daerah mengajak pengusaha untuk menertibkan papan nama dan papan informasi di lingkungannya masing-masing, yakni dengan tetap mengutamakan bahasa negara dan boleh menambahkan bahasa asing jika diperlukan. Di samping itu, juga dilakukan penelitian tentang sikap bahasa para pengusaha dengan tujuan utama untuk mengetahui apakah pengetahuan tentang undang-undang/peraturan kebahasaan berhubungan dengan sikap bahasanya?

**Kata kunci:** multietnis, ruang publik, sikap bahasa

## **1. Pendahuluan**

Kota-kota besar di Indonesia telah menjadi kota metropolitan dengan penduduknya yang multietnis dan multibahasa. Bersamaan dengan hadirnya “pasar modern” secara global, muncul masalah baru, yaitu hadirnya kosakata dan istilah asing yang begitu cepat sehingga ruang-ruang publik kota tersebut dipenuhi oleh kosakata asing. Pada saat yang bersamaan telah terjadi perubahan sikap bahasa masyarakat perkotaan yang perlahan-lahan meninggalkan bahasa daerahnya (bahasa etnisnya) menuju ke bahasa nasional. Banyak keluarga dengan suami dan istri beretnis yang sama tidak lagi mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya.

Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia adalah contoh provinsi dengan persoalan bahasa yang kompleks. Tarik-menarik antara bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing begitu terasa di kota-kota seperti Bandung, Bogor, Depok, Bekasi, dan Cirebon. Semangat kedaerahan begitu kuat bersamaan dengan semangat membangun daerahnya di era otonomi daerah, termasuk semangat mengembalikan nilai-nilai primordial seperti bahasa dan budaya daerah. Pada saat yang bersamaan hadir pula semangat internasionalisasi akibat serbuan kapital dan ekonomi global. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah digeser oleh bahasa asing di ruang-ruang publik. Bahasa negara telah kehilangan martabatnya (murahnya) di rumah sendiri.

## **2. Perencanaan Bahasa**

Bahasa-bahasa di dunia ini dalam perkembangannya mengikuti dua jalan, (1) bahasa yang berkembang secara alamiah, tanpa adanya campur tangan pihak tertentu (contohnya bahasa Melayu klasik) dan (2) bahasa yang berkembang melalui sebuah perencanaan (contohnya bahasa Inggris).

Sehingga abad ke-16, terdapat tiga bahasa yang digunakan di Inggris, yaitu bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Latin. Bahasa Inggris digunakan di rumah dan komunikasi umum, bahasa Perancis digunakan di parlemen dan pemerintahan, dan bahasa Latin digunakan di gereja. Setelah itu, terjadi perubahan besar di Inggris (Jones, 1993).

Pemerintah pada saat itu menetapkan strategi yang amat fundamental, yaitu bahasa Inggris harus digunakan di semua bidang dan ranah pemakaian, termasuk di parlemen dan gereja. Dalam waktu relatif singkat, pemakaian bahasa Perancis dan bahasa Latin tersisih. Sebab, bahasa Perancis yang biasa dipakai di parlemen digantikan oleh bahasa Inggris, begitu pula bahasa Latin yang biasa dipakai di gereja digantikan oleh bahasa Inggris.

Perencanaan yang baik diharapkan akan mendorong sikap positif penutur bahasa yang bersangkutan. Ciri-ciri sikap positif terhadap bahasa menurut Garvin dan Mathiot (1968) adalah:

1. Kesetiaan bahasa (*language loyalty*) yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain;
2. Kebanggaan bahasa (*language pride*) yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat.;
3. Kesadaran adanya norma bahasa (*awareness of the norm*) yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun.

Menurut para ahli, perencanaan bahasa ada empat jenis, yakni: (i) perencanaan status, (ii) perencanaan korpus, (iii) perencanaan pemerolehan, dan (iv) perencanaan prestise. Perencanaan status dan perencanaan korpus diajukan oleh Haugen (1966); perencanaan pemerolehan diajukan oleh Cooper (1989); dan, perencanaan prestise diajukan oleh Haarmann (1990).

Perencanaan bahasa di Indonesia dimulai sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada Sumpah Pemuda 1928 ini status bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Kemudian, dilanjutkan dengan Kongres Bahasa Indonesia I di [Solo, Jawa Tengah](#), Oktober 1938. Pada kongres itu para peserta sudah berpikir tentang bagaimana bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa modern, yakni bahasa yang mampu mengungkapkan gagasan dan pikiran manusia Indonesia yang modern. Pada kongres itu sudah mulai dipikirkan bagaimana mengembangkan istilah dan kosakata untuk menambah daya ungkap bahasa Indonesia. Status bahasa Indonesia semakin kuat setelah pada Pasal 36 UUD 1945 dinyatakan sebagai bahasa

negara. Puncaknya adalah ketika hadir UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam undang-undang itu pasal-pasal tentang pengembangan bahasa Indonesia secara eksplisit dimuat.

### **3. Situasi Kebahasaan di Indonesia**

Setuasi kebahasaan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Pertama, kondisi bahasa daerah yang berjumlah 700-an mengkhawatirkan. Banyak bahasa daerah yang punah, seperti bahasa Bapu, Darbe, dan Wares (di Kabupaten Sarmi), bahasa Taworta dan Waritai (di Jayapura), bahasa Murkim dan Walak (di Jayawijaya), bahasa Meoswas (di Manokwari), dan bahasa Loengenyem (di Raja Ampat). Bahasa daerah dengan penutur terbanyak, seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda, mendapat ancaman dari bahasa nasional. Banyak keluarga dengan suami-istri berbahasa ibu bahasa yang sama tidak lagi mempertahankan bahasa daerah di dalam rumah tangganya. Padahal, pemertahanan bahasa daerah yang terbaik adalah di dalam ranah rumah tangga.

Pada saat yang bersamaan bahasa Indonesia juga mengalami hal yang serupa. Bahasa asing (terutama bahasa Inggris) telah menggeser bahasa Indonesia, terutama di ruang publik. Bahasa asing telah menjajah wilayah pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi tidak bermartabat lagi di negaranya sendiri, telah kehilangan muruahnya. Untuk itu, perlu ada usaha untuk memartabatkan kembali bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Berikut ini saya sampaikan usaha pemartabatan bahasa negara di Provinsi Jawa Barat.

### **4. Pemartabatan Bahasa di Jawa Barat**

Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia adalah contoh provinsi dengan persoalan bahasa yang kompleks. Tarik-menarik antara bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing begitu terasa di kota-kota seperti Bandung, Bogor, Depok, Bekasi, dan Cirebon. Semangat kedaerahan begitu kuat bersamaan dengan semangat membangun daerahnya di era otonomi daerah, termasuk semangat mengembalikan nilai-nilai primordial seperti bahasa dan budaya daerah. Pada saat yang bersamaan hadir pula semangat internasionalisasi akibat serbuan kapital dan ekonomi global. Bahasa Indonesia sebagai

bahasa nasional dan bahasa negara telah digeser oleh bahasa asing di ruang-ruang publik. Bahasa negara telah kehilangan martabatnya (murahnya) di rumah sendiri.

Situasi seperti di atas perlu upaya yang keras untuk kembali memartabatkan bahasa Indonesia. Beberapa langkah kami lakukan untuk mencapai tujuan itu. Upaya yang kami beri tajuk “Pemartabatan Bahasa Negara di Ruang Publik” itu dilakukan melalui beberapa tahapan yang berikut.

#### a. Pemantauan Ruang Publik

Kami melakukan pemantauan dan pengambilan foto pemakaian bahasa di ruang publik di 27 kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat. Tidak kurang dari 26.000 foto pemakaian bahasa yang diambil di hotel, mal, tempat wisata, museum, rumah sakit, stasiun kereta, terminal bus, jalan raya, dan tempat umum yang lain.

#### b. Pemadanan Kosakata/Istilah Asing

Pada tahap ini 26.000 foto yang terkumpul di tahap pertama kami klasifikasikan/kelompokkan berdasarkan ranah-ranahnya. Kemudian, kosakata/istilah asing yang kami temukan dibuat padanannya dalam bahasa Indonesia. Usaha pemadanan ini tidaklah mudah karena kami harus mempertimbangkan ketepatan konsep, citra bunyi/dengaran, dan mudah diingat. Kata seperti *drive thru* (yang pernah diindonesiakan menjadi *kendara lalu/kendara lewat*) kami ubah menjadi *layanan tanpa turun (lantatur)*. Bentuk *kendara lalu* hanya menerjemahkan kata demi kata. Dalam kata *kendara lalu* tetap saja tidak tertangkap konsep yang sebenarnya. Contoh lain bentuk VIP (*very important person*) dipadankan menjadi *naratama* (dari bentuk *nara* dan *utama*) dan bentuk VVIP (*very very important person*) dipadankan menjadi *naratetama*.

#### c. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi

Pada acara rapat koordinasi ini hasil pemantauan dan pemadanan dipaparkan di depan pemangku kepentingan, seperti para pengusaha dan wakil pemerintah daerah. Kami meminta masukan dan tanggapan dari mereka yang ruang publiknya kami ambil fotonya. Kami

meminta masukan dari mereka langkah apa yang harus dilakukan untuk menertibkan pemakaian bahasa di ruang publik. Hasilnya adalah kami harus melakukan sosialisasi hasil pemantauan dan pepadanan langsung kepada para pengusaha di tiap kota/kabupaten agar mereka memahami dan menyadari kesalahannya.

#### d. Penertiban Bahasa di Ruang Publik

Hasil rapat koordinasi yang lain adalah perlunya upaya langsung untuk menertibkan pemakaian bahasa di ruang publik. Mengingat lembaga kami (Balai Bahasa Jawa Barat) tidak mempunyai kewenangan untuk menertibkan langsung pemakaian bahasa di ruang publik, kami perlu bekerja sama dengan bupati dan wali kota mengingat merekalah penguasa ruang publik di wilayah masing-masing. Bentuk kerja sama yang kami lakukan adalah dengan mengadakan lomba pemertabatan bahasa di ruang publik.

Kami meminta bupati dan wali kota untuk mengeluarkan surat edaran tentang lomba tersebut. Lomba tersebut memperebutkan piala bupati dan wali kota di wilayah tersebut sesuai dengan ranah-ranah yang ada. Dengan demikian, dalam setiap ranah (misalnya ranah hotel) lomba akan diikuti oleh seluruh hotel yang ada di wilayah tersebut. Pada akhir lomba dipilih hotel dengan pemakaian bahasa terbaik dan hotel yang memenangi lomba mendapat hadiah piala bupati/wali kota dan prasasti dengan tanda tangan bupati/wali kota. Hadiah lomba diberikan oleh bupati/wali kota bersamaan dengan agenda acara yang ada di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Prasasti lomba bagi pemenang itu wajib ditempatkan di ruang utama hotel yang bersangkutan sehingga setiap orang yang hadir di hotel tersebut akan membaca prasasti tersebut . Prasasti itu menyebutkan bahwa hotel ini telah memenangi lomba pemertabatan bahasa negara yang diadakan oleh bupati/wali kota. Dengan cara lomba itu secara tidak langsung semua hotel telah menertibkan bahasanya dan telah berusaha memertabatkan bahasa negara. Lomba juga dilakukan pada semua ranah, yaitu pusat belanja, rumah sakit, tempat wisata, museum, dan yang lain sesuai dengan kondisi dan kesepakatan dengan pemerintah kota/kabupaten.

## **5. Penutup**

Apa yang kami lakukan dalam rangka memartabatkan bahasa dengan menggandeng bupati dan wali kota adalah salah satu cara mengingat kami tidak mempunyai kewenangan langsung untuk menertibkan ruang publik. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 juga tidak ada sanksi bagi pelanggar bahasa sehingga langkah yang dapat kami lakukan adalah dengan menggugah kesadaran dan rasa nasionalisme para pemilik ruang publik itu akan pentingnya memartabatkan bahasa Indonesia sebagai negara. Untuk melengkapi kegiatan pemartabatan bahasa itu, kami juga melakukan penelitian tentang sikap bahasa para pengusaha sehingga kami mengetahui aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku para pengusaha secara lebih komprehensif.

## **Daftar Pustaka**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011. *Perencanaan Bahasa Pada Abad Ke-21 : Kendala dan Tantangan (Risalah Simposium Internasional Perencanaan Bahasa)*. Jakarta.

Simpson, Paul dan Andrea Mayr. 2010. *Language and Power*. London and New York: Roulledge.

Thomas, Linda dan Shan Wareing. 2007. *Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.